

Rabu, 22 December 2021

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	Kesadaran Perlindungan Asuransi Jiwa Saat Pandemi Covid-19 Perkuat Tren Stabil-Positif
Nama Media	Bhirawa
Newstrend	Kinerja Asuransi Jiwa
Halaman/URL	4
Tanggal Berita	2021-12-21
Sentimen	Positif

Kinerja Kuartal III 2021 AAJI

Kesadaran Perlindungan Asuransi Jiwa Saat Pandemi Covid-19 Perkuat Tren Stabil-Positif

Makin baiknya kesadaran masyarakat atas perlindungan diri saat Pandemi Covid-19 menjadi katalis positif bagi pertumbuhan positif industri asuransi jiwa di kuartal III tahun ini. Tren industri yang makin positif dan stabil terjadi sejak awal tahun tersebut dinilai Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) memberikan optimisme di momen pergantian tahun 2021 ini.

Pertanda terjadinya rebound kinerja industri di kuartal III tahun ini terlihat dari tumbuh positifnya pendapatan di berbagai lini usaha industri asuransi jiwa. Total pendapatan yang dibukukan industri mencapai Rp171,36 triliun. Angka tersebut setara dengan pertumbuhan sebesar 38,7 persen (YoY) dibandingkan periode sama tahun lalu.

Dalam Laporan Kinerja Industri Asuransi Jiwa dari 58 perusahaan yang dinaungi AAJI, terlihat bahwa tekanan penurunan pendapatan akibat pandemi mulai mereda. Bahkan kinerja pendapatan kuartalan sudah melampaui kinerja pada

2019 saat pandemi belum terjadi.

Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampubolon mengungkapkan konsistensi kinerja pendapatan industrinya ditopang oleh kondisi perbaikan ekonomi nasional dan meningkatnya kesadaran masyarakat soal perencanaan keuangan baik untuk memperoleh perlindungan asuransi jiwa maupun perencanaan investasi.

"Faktor kesadaran masyarakat untuk berasuransi pada masa pandemi yang meningkat drastis menjadi salah satu pendorong penting naiknya pendapatan industri asuransi jiwa di kuartal III 2021. Kami bersyukur atas pertumbuhan sebe-

sar 39,7 persen yang dicapai ini. Makin menurunnya angka penularan Covid-19, berangsur aktifnya perekonomian, dan kesadaran masyarakat atas perlindungan asuransi jiwa menjadi pendorongnya," terangnya, Senin (20/12).

AAJI menjelaskan bahwa industri asuransi jiwa Indonesia mencatat total pendapatan premi sebesar Rp149,36 triliun atau tumbuh sebesar 11,5 persen. "Meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap asuransi jiwa dan dorongan kondisi pandemi menjadi katalis utamanya," ujarnya.

Budi menjelaskan bahwa kinerja positif pendapatan tersebut disumbang oleh kenaikan premi bisnis baru dan premi lanjutan. Masing-masing premi tersebut tumbuh 17,6% (YoY) menjadi Rp94,2 triliun, dan 2,4 persen menjadi Rp55,15 triliun.

Adapun produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) atau Unit Link, masih mendomi-

nasi dengan kontribusi sebesar 62,5 persen dari total pendapatan premi. Selama kuartal III 2021, produk asuransi jiwa Unit Link bernilai total Rp93,31 triliun atau naik 9,0 persen (YoY), sementara produk bertipe tradisional mencapai Rp56,04 triliun atau naik 15,7 persen.

Masih naiknya terus penjualan produk Unit Link di era pandemi ini terkait dengan keunggulan benefit yang dimilikinya. Kombinasi dari proteksi dan investasi produk Unit Link menjadi benefit yang unik dan disukai pasar yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperoleh keuntungan berupa proteksi dan juga manfaat tambahan untuk investasi.

Sementara itu, klaim nilai tebus (surrender) di kuartal III mengalami perlambatan sebesar 11,9%. Tercatat, nilai tebus di kuartal III tahun lalu mencapai Rp67,46 triliun dan menjadi Rp59,42 triliun di kuartal



Pemetaan kinerja pertumbuhan positif industri asuransi jiwa di kuartal III tahun 2021 secara virtual.

yang sama tahun ini.

Untuk klaim tebus parsial (partial withdrawal), terjadi kenaikan dari Rp10,31 triliun menjadi Rp12,6 triliun di kuartal III dibandingkan tahun lalu. Perubahan tersebut setara dengan kenaikan 22,2 persen (YoY). "Perlambatan klaim surrender dan pertumbuhan klaim partial withdrawal menjadi indikasi kuat

dari meningkatnya kesadaran tentang pentingnya asuransi. Saat ini masyarakat memilih untuk tidak buru-buru menutup polisnya. Pengalaman kita saat pandemi memuncak beberapa waktu lalu, telah membuat kita makin yakin tentang pentingnya asuransi jiwa dalam melindungi diri dan keluarga tercinta," jelas Budi. [rlq]

Judul	60 Asuransi Corona Ini Bisa Cover Risiko COVID-19, Berikut Daftarnya
Nama Media	Mommiesdaily.com
Newstrend	Rekomendasi Asuransi Cover COVID-19
Halaman/URL	https://mommiesdaily.com/2021/12/21/60-asuransi-corona-ini-bisa-cover-risiko-covid-19-berikut-daftarnya/
Tanggal Berita	2021-12-21
Sentimen	Positif

ETC. FINANCIAL LIFESTYLE SELF

60 Asuransi Corona Ini Bisa Cover Risiko COVID-19, Berikut Daftarnya.

DECEMBER 21, 2021



DHEVITA WULANDARI

Meski ditanggung pemerintah, Mommies juga bisa mempersiapkan biaya proteksi untuk keluarga apabila terkena COVID-19 dengan 60 asuransi corona berikut ini.

Pandemi COVID-19 belum juga selesai dan penyebaran virus corona masih terus terjadi. Menurut data dari Satuan Petugas (Satgas) Penanganan COVID-19, per 16 Desember 2021, terdapat 213 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Dengan penambahan kasus baru ini, maka total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 4.259.857, terhitung sejak adanya kasus COVID-19 pertama kali yang diumumkan pada 2 Maret 2020.

Setiap orang yang terkena COVID-19 akan mendapatkan perawatan dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah dan sumber anggaran masih dari Kementerian Kesehatan RI. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan RI dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid.

Meski tetap ditanggung oleh pemerintah, memiliki asuransi dinilai dapat memberikan kemudahan dalam penanganan dan perawatan yang lebih cepat jika terdampak COVID-19. Selain itu, asuransi juga memberikan perawatan di luar rumah sakit yang dirujuk oleh pemerintah dan menyediakan penambahan cakupan manfaat terkait COVID-19 tanpa tambahan premi. Maka dari itu untuk menghadapi pandemi ini, dibutuhkan juga asuransi corona atau proteksi terhadap risiko terdampak COVID-19.

Asuransi corona adalah sebuah produk asuransi kesehatan dan asuransi jiwa yang menanggung pasien terinfeksi virus corona. Hingga saat ini, beberapa perusahaan asuransi sudah memiliki produk yang dapat memberikan cover COVID-19 sebagai bentuk manfaat tambahan maupun sebagai kompensasi untuk para nasabahnya.

Judul	Industri Asuransi di Tahun 2022 Lebih Baik Dari 2021
Nama Media	Krjogja.com
Newstrend	Prediksi Industri Asuransi 2022
Halaman/URL	https://www.krjogja.com/peristiwa/nasional/industri-asuransi-di-tahun-2022-lebih-baik-dari-2021/
Tanggal Berita	2021-12-21
Sentimen	Positif



"Tahun 2022 perlu cermati, pasalnya pada tahun ini masih mengandung risiko ketidakpastian terutama karena adanya varian baru dari covid -19 yakni omicron," kata Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2a Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Nasrullah dalam acara Insurance Outlook 2022, secara virtual di Jakarta, Selasa (21/12/2021).

Dikatakan, varian baru ini menjadi ancaman bagi bangsa dan negara termasuk dalam hal kondisi terburuk ditutupnya berbagai perbatasan atau pintu masuk untuk mencegah semakin menularnya virus omicron.

"Kita tidak tahu seberapa besar dampaknya bagi kondisi masyarakat secara umum maupun perekonomian dengan adanya omicron ini, yang jelas di Eropa, beberapa negara sudah kembali mengeluarkan kebijakan memberlakukan Lockdown dan segala macam," tegasnya.

Sebenarnya, tambah Nasrullah, melihat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III tahun 2021 sebesar 3,51 persen dan turunnya jumlah harian terkonfirmasi covid-19 menjadi salah satu kunci bagi sisi perekonomian Indonesia khususnya industri asuransi ke depan.

"Pemerintah kita bisa menangani pandemi dengan sangat baik tentunya ini salah satu kunci bagi kita dari sisi perekonomiannya ya khususnya bagi industri asuransi. Pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat tentunya berdampak positif terhadap kinerja secara keseluruhan," paparnya.

Dikatakan, industri asuransi salah satu industri yang cukup resilient dalam menghadapi dampak pandemi covid 19. Secara industri mengalami tekanan terutama di industri asuransi jiwa dimana pertumbuhan preminya menurun bahkan sempat negatif, namun di sektor asuransi umum sehingga year-on-year pertumbuhan aset dan investasi masing-masing tumbuh sebesar 5,73 persen dan 13,7 persen.

"Secara year on year pertumbuhannya untuk sektor asuransi di tengah permasalahan yang terjadi terhadap beberapa perusahaan asuransi besar, sekarang sudah kita pahami bersama, syukur alhamdulillah," paparnya.

Nasrullah juga melihat tren yang positif. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berasuransi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini masyarakat cukup baik terhadap sektor asuransi karena dirasa mampu memberikan proteksi dari berbagai ketidakpastian di masa pandemi seperti sekarang ini.

Misalnya pendapatan premi per Oktober untuk asuransi komersial kenaikan premi sebesar Rp 10,85 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 4,92 persen. "Meskipun pertumbuhan biasa kita double digit, kali ini tinggal satu digit dulu kita syukur Alhamdulillah, ya artinya memang masih ada potensi kedepannya terutama di 2022," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasanibu mengatakan, kinerja industri asuransi pada tahun 2022 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021. Namun ini sangat tergantung kepada perkembangan kasus covid -19 varian omicron dan kebijakan yang diambil pemerintah ke depannya.

Judul	Strategi PasarPolis Menempatkan Asuransi sebagai Bagian Gaya Hidup Digital
Nama Media	Dailysocial.id
Newstrend	Strategi Pasar Polis
Halaman/URL	https://dailysocial.id/post/strategi-pasarpolis-asuransi-gaya-hidup-digital
Tanggal Berita	2021-12-21
Sentimen	Positif

Feature

Strategi PasarPolis Menempatkan Asuransi sebagai Bagian Gaya Hidup Digital



Cleosent Randing (tengah) bersama anggota tim PasarPolis di Jakarta / PasarPolis

Gencarkan layanan berbasis "embedded insurance", terintegrasi dengan puluhan aplikasi konsumen berbasis pengguna besar

Randi Eka - 21 December 2021

Sejak lima tahun ke belakang, penetrasi asuransi di Indonesia masih konsisten di kisaran mendekati 3%. Metrik tersebut dihitung berdasarkan pertumbuhan (*growth*) produk atau layanan asuransi dengan GDP. Itu pun masih keberadaan asuransi jiwa masih sangat mendominasi. Program pemerintah mulai "mendorong" masyarakat untuk memiliki layanan BPJS Kesehatan.

Dari fakta tersebut, teknologi diyakini dapat menjembatani kesenjangan yang ada. Hadirnya produk asuransi yang dikemas dalam sebuah aplikasi digital, diharapkan mampu mendekatkan layanan terhadap kebutuhan masyarakat – di tengah angka kesadaran berasuransi yang berangsur meningkat. *Misalnya selama masa pandemi.*

Judul	Memahami Produk Asuransi Unitlink
Nama Media	Cnnindonesia.com
Newstrend	Manfaat Asuransi Unit Link
Halaman/URL	https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211221085021-78-736610/memahami-produk-asuransi-unitlink
Tanggal Berita	2021-12-21
Sentimen	Netral

Home > Ekonomi > Keuangan

Memahami Produk Asuransi Unitlink

CNN Indonesia

Selasa, 21 Dec 2021 10:52 WIB

Bagikan :



Unitlink mengkombinasikan asuransi dan investasi dalam satu produk. Perencana keuangan menilai produk ini hanya cocok bagi Anda yang ingin praktis. (istockphoto/2immytwa)

Jakarta, CNN Indonesia -- Produk dan jasa keuangan memiliki banyak banyak fungsi dan kegunaan, bergantung kebutuhan apa yang Anda perlukan. Namun, tahukah Anda bahwa setidaknya hanya terdapat dua jenis produk keuangan yang perlu dimiliki oleh setiap orang, yakni produk **investasi** dan produk proteksi atau **asuransi**. Keduanya menjadi satu produk dalam produk **unitlink**.

Founder sekaligus Perencana Keuangan Oneshlidi Consulting Rizza Bambang mengatakan produk investasi memiliki beragam jenis, seperti emas, obligasi, deposito, hingga saham. Sementara, produk proteksi juga memiliki beberapa jenis seperti asuransi kesehatan hingga asuransi jiwa.

Lantas, produk asuransi unitlink menjadi bagian produk keuangan yang mana?



ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lihat Juga :

ANALISIS

Moratorium Unitlink Solusi Agar Tak Termakan Janji Manis Agen Asuransi

Rizsa mengatakan unitlink merupakan produk keuangan gabungan antara investasi dan proteksi atau asuransi. Unitlink memiliki fungsi sebagai instrumen investasi, namun juga dapat menjadi instrumen asuransi dalam waktu bersamaan.

Perencana Keuangan Tatadana Consulting Tejasari Assad menyebut bahwa unitlink merupakan asuransi jiwa yang memiliki manfaat tambahan investasi dari sebagian premi yang dibayarkan nasabah asuransi.

"Sebagian dari premi yang dibayarkan, dialokasikan ke produk investasi, untuk dikembangkan sesuai jenis investasi yang dipilih. Hasil pengembangan investasi ini akan digunakan untuk pembayaran premi asuransi setelah periode pembayaran selesai. Misalnya, 10 tahun pembayaran, selanjutnya premi dibayarkan dari pemotongan dana hasil investasi," tutur Tejasari kepada *CNNIndonesia.com*, Senin (20/12).

Judul	Kelas Standar BPJS Berlaku 2022, Ada Risiko Kenaikan Tunggakan Iuran
Nama Media	Katadata.co.id
Newstrend	BPJS Kesehatan
Halaman/URL	https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/61c1478187bb6/kelas-standar-bpjs-kesehatan-mulai-2022-tunggakan-iuran-berisiko-naik
Tanggal Berita	2021-12-21
Sentimen	Netral

[Home](#) > [Finansial](#) > [Makro](#)
Kelas Standar BPJS Kesehatan Mulai 2022, Tunggakan Iuran Berisiko Naik

BPJS Watch memperingatkan penerapan kelas standar berisiko meningkatkan tunggakan iuran peserta yang saat ini berada di kelas 3.

Oleh **Abdul Azis Said**
21 Desember 2021, 09:43



Dkatadata.co.id

Makro | Kelas Standar BPJS Kesehatan Mulai 2022, Tunggakan Iuran



Ilustrasi. BPJS Kesehatan saat ini memberlakukan iuran sebesar Rp 35.000 untuk kelas III, Rp 100.000 untuk kelas II dan Rp 150.000 untuk kelas I.

Pemerintah berencana menyederhanakan kepesertaan **BPJS Kesehatan** kelas mandiri dari saat ini terdiri atas kelas 1, 2 dan 3 menjadi **kelas standar** untuk peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (non-PBI) mulai tahun depan. Namun, BPJS Watch memperingatkan penerapan kebijakan ini berisiko menaikkan tunggakan pembayaran iuran, terutama oleh peserta yang kini adalah peserta mandiri kelas 3.

Koordinator bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, penyederhaan dari tiga kelas menjadi satu kelas yang sama akan ikut mengubah ketentuan iuran yang akan dibayar peserta. Iuran kemungkinan akan berada di rentang Rp 50 ribu- Rp 75.000. Ini akan menguntungkan bagi kelas 1 dan 2 karena iurannya akan turun, tapi tidak bagi peserta mandiri kelas 3.



"Bagaimana memitigasi kelas mandiri kelas 3, dengan iuran Rp 35.000 saja sudah banyak yang menunggak. Bagaimana kalau dinaikkan menjadi Rp 50.000?," kata Timboel kepada *Katadata.co.id*, Senin (20/12).

Dia tidak menampik masih terdapat beberapa peserta yang sebenarnya tergolong mampu tetapi turun menjadi kelas 3 karena kenaikan iuran sebelumnya. Namun, tidak sedikit juga peserta kurang mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima PBI sehingga terpaksa mendaftar mandiri dengan iuran paling murah. Perubahan iuran kelas standar, menurut dia, terjadinya kontraproduktif terhadap kepesertaan terutama dari kelas 3.

Judul	Salurkan Premi Gratis untuk 2.500 Nelayan
Nama Media	Radar Banyuwangi
Newstrend	Asuransi Jiwa Gratis Pemkab Banyuwangi
Halaman/URL	13 & 19
Tanggal Berita	2021-12-21
Sentimen	Netral

ASURANSI



PERLINDUNGAN: Bupati Ipuk menyerahkan bantuan premi asuransi gratis secara simbolis kepada perwakilan nelayan kecil dalam rangkaian peringatan Harjaba ke-250.

Salurkan Premi Gratis untuk 2.500 Nelayan

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Pemkab Banyuwangi memberikan bantuan premi asuransi jiwa secara gratis bagi 2.500 nelayan. Sasaran program asuransi tersebut adalah para nelayan kecil alias nelayan yang memiliki kapal di bawah 5 Gross Tonnage (GT) ■

► Baca **Salurkan...** Hal 19

Salurkan Premi Gratis untuk 2.500 Nelayan

Sambungan dari hal 13

Bantuan premi asuransi gratis bagi nelayan kecil tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Ipuk Fiestiandani didampingi Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi Alief Rachman Kartiono.

Bupati Ipuk mengatakan, bantuan premi asuransi ini adalah program untuk memberikan perlindungan bagi individual nelayan kecil dan tradisional. Mengingat profesi nelayan memiliki risiko yang cukup tinggi dalam menjalankan pekerjaannya.

"Saat melakukan kegiatan penangkapan ikan, nelayan sering kali dihadapkan pada cuaca tidak bersahabat. Kami berharap bantuan premi ini akan memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang dialami nelayan di masa yang akan datang," ujarnya usai upacara peringatan Hari Jadi Banyuwangi

(Harjaba) ke-250 yang digelar di Pendapa Sabha Swagata Blambangan, Sabtu (18/12).

Ipuk menuturkan, program ini diharapkan akan memberikan perlindungan dan memberikan jaminan keamanan serta keselamatan bagi para nelayan. Selain itu juga dapat menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya asuransi dan membangun keinginan nelayan untuk ikut serta dalam program asuransi secara mandiri. "Masa pertanggungjawaban program ini berlaku terbatas. Setelah itu, nelayan kita dorong tetap berasuransi dengan asuransi nelayan mandiri," tuturnya.

Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi Alief Rachman Kartiono mengatakan, bantuan premi asuransi tersebut sebagai stimulus dengan harapan para nelayan memiliki kesadaran berasuransi dengan premi sebesar Rp16.800

per bulan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. "Nelayan merupakan salah satu profesi yang memiliki risiko besar. Program asuransi ini akan menjamin perlindungan para nelayan terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi saat mereka bekerja," kata dia.

Alief menjelaskan, sasaran program asuransi tersebut adalah para nelayan kecil yakni nelayan yang memiliki kapal di bawah 5 GT. Syaratnya, nelayan memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan telah mengantongi Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Kusuka ini membuktikan bahwa mereka benar-benar nelayan. Sehingga program ini tepat sasaran," terangnya.

Alief mengaku pihaknya terus mendorong agar nelayan bisa

ikut asuransi mengingat manfaatnya yang besar. Dengan membayar premi per bulannya, mereka mendapatkan manfaat yang besar. Yakni pertanggungan yang dijamin berupa kecelakaan yang menyebabkan kematian atau cacat tetap serta jaminan biaya pengobatan. Antara lain bila terjadi kematian karena kecelakaan kerja mendapat pertanggungan Rp 70 juta, ditambah beasiswa anak 2 juta. Bila terjadi kematian bukan karena kecelakaan kerja mendapat uang pertanggungan Rp 42 juta.

"Kami terus melakukan sosialisasi kepada nelayan karena besarnya manfaat ikut asuransi ini. Kami membuka layanan di gerai perizinan nelayan di Grajagan, Kecamatan Purwoharjo untuk pengurusan kartu Kusuka maupun fasilitasi asuransi. Juga dan *door to door* saat pendampingan kelompok untuk asuransi," pungkas Alief. (sgt/aif/cl)

Judul	Jamkesmas PBI Ditanggung Negara
Nama Media	Riau Post
Newstrend	Jamkesmas PBI
Halaman/URL	20
Tanggal Berita	2021-12-21
Sentimen	Netral

Jamkesmas PBI Ditanggung Negara

Pemko Dumai *MoU* dengan BPJS Kesehatan

Laporan RPG, Dumai

MEMASTIKAN semua masyarakat kurang mampu atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan ditanggung kesehatannya oleh pemerintah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pemerintah yang berwujud BPJS dan sistem asuransi,

Pemerintah Kota Dumai bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MOU)*.

Wali Kota Dumai, H Paisal menghadiri penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota Dumai dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Ruang Rapat BPJS Kesehatan Jalan Jenderal Sudirman (20/12).

MoU kerja sama ini terkait tindak lanjut



PAISAL

peraturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai optimalisasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Wali Kota Dumai, H Paisal dalam kesempatan tersebut menyampaikan, dengan adanya penandatanganan MoU ini, dapat mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Dengan adanya penandatanganan

MoU ini mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di Rumah Sakit terkait pasien BPJS ini dapat tertangani juga," harapnya.

Kepala BPJS, Harie Wilhawa dalam sambutannya mengatakan, nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 22 mengenai perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah. "Untuk penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dalam JKS, wajib didasari nota kesepahaman dengan

pimpinan daerah, sebagai tindak lanjut pemerintah daerah terhadap program nasional. Kita juga melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan yakni mengenai kuota penerima kartu JKS tersebut," ucapnya.

Wali Kota Dumai menyerahkan secara simbolis kartu BPJS Kesehatan kepada masyarakat penerima Program JKN. Turut hadir dalam penandatanganan MoU ini, Kepala Dinas Kesehatan, serta masyarakat penerima Program Kartu JKN-KIS. (mx12/lim)

Judul 46.593 Penerima PBI Dinonaktifkan

Nama Media Radar Sulbar

Newstrend Jamkesmas PBI

Halaman/URL 2

Tanggal Berita 2021-12-21

Sentimen Netral

DIDUGA DATA BERMASALAH

46.593 Penerima PBI Dinonaktifkan



KONFERENSI PERS. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polman Azwar Jasin bersama Pasi Intel Kodim 1402 Polman, Kapten Inf Suharbas saat menggelar konferensi pers di Kantor Dinsos Polman, Senin 20 September 2021.

REPORTER : ARIF BUDIANTO
EDITOR : AMRI MAKKARUBA

POLEWALI, RADAR SULBAR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar melalui Dinas Sosial (Dinsos) menonaktifkan 46.593 nama Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena diduga fiktif.

Selain itu nama tersebut tak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, penonaktifan ini karena data Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, sudah meninggal dunia, pindah segmen dan data yang tidak diketahui keberadaannya.

Kepala Dinas Sosial Polman Azwar Jasin mengungkapkan, 46.593 nama tersebut merupakan data yang dikirim oleh Kementeri-

an Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Kemensos meminta agar mencari tahu alasan kenapa 46 ribu warga Polman ini tidak masuk dalam DTKS. Pihaknya sudah menyampaikan data ini ke seluruh desa dan kelurahan untuk memastikan warganya.

"Dari 167 desa dan kelurahan, baru 51 desa yang sudah mengembalikan data dari 8.711 jiwa ada 5.332 jiwa yang ditemukan untuk diusulkan kembali masuk ke DTKS.

Selebihnya 3.379, diantara 3.067 nama yang sudah tidak ditemukan. Ada yang jadi TKI sehingga dikeluarkan dan tidak diusulkan lagi ke DTKS," jelas Azwar Jasin.

Kemudian ada 243 jiwa yang sudah meninggal dunia. Azwar Jasin menjelaskan berdasarkan aturan yang boleh mendapatkan bantuan dari program pemerintah adalah yang masuk dalam DTKS. 46 ribu jiwa ini adalah data non DTKS yang dikembalikan oleh Pusdatin ke Polman dan sudah diverifikasi di desa.

Azwar juga menyampaikan, 46 ribu jiwa masuk PBI JKN sudah dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial sejak bulan Oktober 2021. Ia juga mengatakan akan menyampaikan kembali data hasil verifikasi dari desa dan kelurahan yang belum melaporkan hasil verifikasinya.

Sementara Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Polman, Imran Hasyim saat dihubungi mengaku belum menerima data dari kantor pusat terkait adanya penonaktifan peserta tersebut. Karena penonaktifan peserta PBI tak masuk dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Nex Generation (SIKS-NG) merupakan kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

"Kami tak ada komentar apapun karena belum menerima data dari kantor pusat. Hanya mendapat informasi dari Dinsos Polman. Kami masih menunggu informasi dari kantor pusat terkait data penonaktifan peserta tersebut," tandasnya.

TAK ADA TNI TERIMA BANSOS

Kadis Sosial Polman Azwar Jasin membantah jika ada anggota TNI maupun Polri namanya masuk data penerima Bantuan Sosial (Bansos). Dari 69 nama tersebut tak ada satu pun anggota TNI/Polri yang namanya masuk data DTKS sebagai acuan penerima Bansos.

"69 orang yang menjadi pertanyaan karena masuk dalam kolom aplikasi orang mampu, ASN, TNI dan Polri. Dari data 69 orang ini tidak terdapat anggota TNI dan Polri, yang paling banyak adalah keluarga mampu dan ada beberapa ASN," terangnya.

Pasi Intel Kodim 1402 Polman Kapten Inf Sumharbas menyampaikan dari penyampaian Kadis Sosial Polman tidak anggota TNI yang masuk dalam data penerima bantuan tersebut.

"Semua sudah dicek oleh Kadis Sosial, bahwa tidak ada anggota TNI yang masuk dalam data penerima bantuan sosial," jelas Kapten Inf. Sumharbas. (*)

Judul	Pendapatan Premi Asuransi Tumbuh 4,92 Persen pada Oktober 2021
Nama Media	Kompas.com
Newstrend	Pertumbuhan Kinerja Asuransi
Halaman/URL	https://money.kompas.com/read/2021/12/21/210000026/pendapatan-premi-asuransi-tumbuh-4-92-persen-pada-oktober-2021
Tanggal Berita	2021-12-21
Sentimen	Netral

Kompas.com / Money / Whats New

Pendapatan Premi Asuransi Tumbuh 4,92 Persen pada Oktober 2021

Kompas.com - 21/12/2021, 21:00 WIB

BAGIKAN: [f](#) [t](#) [w](#) [v](#)

Komentar



Ilustrasi asuransi jiwa. (SHUTTERSTOCK/REDPIXEL.PL)



Editor: Yoga Sukmana

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pendapatan premi untuk asuransi komersial tumbuh 4,92 persen yoy (secara tahunan) di Oktober 2021. Adapun, nilai kenaikannya mencapai Rp 10,85 triliun.

"Kita patut syukuri meskipun biasanya kita *double digit*, ini *single digit* dulu. Itu sudah syukur alhamdulillah. Itu artinya ada potensi ke depannya," ujar Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 2A, OJK Ahmad Nasrullah dalam webinar, Selasa (21/12/2021).

Menurut Ahmad, saat ini *appetite* masyarakat terhadap sektor asuransi masih cukup tinggi sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk berasuransi. Mengingat, kondisi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang saat ini masih ada.

Sementara itu, Ahmad juga menyoroti terkait kebijakan mengenai produk asuransi yang diinvestasikan (Paydi) atau yang juga dikenal dengan unitlink yang beberapa waktu belakangan menjadi sorotan.

Baca juga: [Expo 2020 Dubai, Produk UKM Karya Difabel Ramaikan Paviliun Indonesia](#)

Ia bilang OJK juga sedang melakukan proses revisi atau penyempurnaan mengingat aturan yang ada sudah berumur 15 tahun.

"Kami juga sudah bicara dengan asosiasi kira-kira potensi-potensi perbaikannya akan seperti apa," jelasnya.



TERPOPULER

- 1 Minta Dirut Dicapot, Serikat Pekerja Pertamina Ancam Mogok Kerja
Dibaca 29.172 kali
- 2 Mulai Hari Ini Tarif

Judul	OJK Kebut Tiga Regulasi untuk Industri Asuransi. Apa Saja?
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Revisi Peraturan OJK
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20211221/215/1480177/ojk-kebut-tiga-regulasi-untuk-industri-asuransi-apa-saja
Tanggal Berita	2021-12-21
Sentimen	Netral

Home • Finansial • Asuransi

OJK Kebut Tiga Regulasi untuk Industri Asuransi. Apa Saja?

Ada 3 regulasi yang menjadi prioritas regulator untuk segera diselesaikan dan diterbitkan dalam waktu dekat.

Denis Riantiza Mellanoya - Bisnis.com
21 Desember 2021 | 17:06 WIB



Karyawan menjawab telepon di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Senin (30/12/2019). *Bisnis - Abdullah Azzam*

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merevisi dan merampungkan tiga regulasi untuk industri asuransi, mulai dari regulasi terkait produk asuransi unit-link, pengaturan *insurtech*, hingga kebijakan *countercyclical*. Ketiga regulasi ini menjadi prioritas regulator untuk segera diselesaikan dan diterbitkan dalam waktu dekat.

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 2A OJK, Ahmad Nasrullah menyampaikan, regulasi terkait produk asuransi unit-link menjadi perhatian bagi regulator seiring munculnya permasalahan di pasar terhadap produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) tersebut.

Di sisi lain, ketentuan yang mengatur unit-link juga telah berusia 15 tahun, sehingga regulator menilai adanya urgensi untuk merevisi dan menyempurnakannya.

Baca Juga : Asuransi Berbasis Indeks, Peluang Lindungi Sektor Pertanian hingga Pertambangan

Dia menuturkan, penyelesaian aturan baru terkait unit-link tersebut, saat ini, telah memasuki tahap akhir dan diharapkan bisa segera terbit dalam waktu dekat.



"Kami sudah bicara dengan asosiasi, kira-kira potensi perbaikan akan seperti apa. Ini memang sudah ditunggu industri. Insya Allah, mudah-mudahan ini sudah tahap akhir untuk penyelesaiannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami keluarkan aturannya," ujar Nasrullah dalam webinar Insurance Outlook 2022, Selasa (21/12/2021).

Selain regulasi unit-link, OJK juga tengah merevisi Peraturan OJK Nomor 70 /POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. Nasrullah menuturkan, revisi aturan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berkembangnya *insurance technology (insurtech)* di Indonesia.

Baca Juga : OJK Dorong Pengembangan Produk Asuransi Pertanian

Sejauh ini, kata Nasrullah, OJK belum mengatur secara khusus terkait penyelenggaraan *insurtech*. Dengan berkembangnya *insurtech* di Indonesia, pengaturan *insurtech* pun turut menjadi prioritas regulator untuk segera diselesaikan.



"*Insurtech* akan diprioritaskan juga untuk kami terbitkan segera, supaya aturannya nanti jelas, penyelenggara *insurtech* seperti apa. Supaya nanti level *playing field* di pasarnya menjadi jelas," tuturnya.

Tak kalah penting, OJK juga tengah menyiapkan perpanjangan kebijakan *countercyclical* khusus untuk lembaga jasa keuangan non-bank. Perpanjangan kebijakan tersebut dilakukan guna mengantisipasi kondisi ketidakpastian pada 2022 akibat pandemi Covid-19.

Nasrullah menyampaikan bahwa OJK siap mengakomodasi kebutuhan para pelaku industri jasa keuangan non-bank, termasuk asuransi, dalam bentuk kebijakan dan aturan untuk menjaga stabilitas industri dalam menghadapi kondisi pandemi.

"Kami melihat pandemi ini masih perlu jadi perhatian kita dan kami ada kewajiban menjaga stabilitas industri dengan menerbitkan kebijakan *countercyclical* yang sudah ada akan kami perpanjang. Akan kami tambah berdasarkan masukan industri nanti, apa yang perlu kami fasilitasi untuk membantu industri hadapi ketidakpastian di 2022," ujarnya.

Judul	Allianz Life Catat Premi Bruto Capai Rp14,9 Triliun di Kuartal III
Nama Media	Medcom.id
Newstrend	Kinerja Positif Allianz Life
Halaman/URL	https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/yKXqXj9N-allianz-life-catat-premi-bruto-capai-rp14-9-triliun-di-kuartal-iii
Tanggal Berita	2021-12-21
Sentimen	Netral

HOME — EKONOMI — KEUANGAN

Chief Marketing Officer Allianz Life Karin Zulkarnaen. FOTO: Medcom.id/Angga Bratadharna

Allianz Life Catat Premi Bruto Capai Rp14,9 Triliun di Kuartal III

Ekonomi ■ asuransi ■ asuransi jiwa ■ Allianz Indonesia

Angga Bratadharna • 21 Desember 2021 21:12

Jakarta: Allianz Life Indonesia mencatat premi bruto hingga kuartal ketiga 2021 mencapai Rp14,9 triliun atau naik 26,6 persen ketimbang periode yang sama di tahun sebelumnya. Dengan pemulihan ekonomi yang terus digenjut pemerintah diharapkan bisa berdampak positif terhadap kinerja industri asuransi di 2022.

Sedangkan jumlah klaim yang dibayarkan hingga akhir kuartal III-2021, Chief Marketing Officer Allianz Life Indonesia Karin Zulkarnaen Karin, mencapai Rp10,1 triliun atau naik sebanyak 34 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

"Pembayaran klaim ini adalah faktor yang sangat penting dan menepati janji kami untuk bisa memproses klaim dengan mudah dan secepatnya karena banyak keluarga yang membutuhkan nilai dari klaim tersebut," tuturnya, dalam diskusi virtual bertajuk 'How Insurance and Media Survive During the New Normal & Get Ready for 2022', Selasa, 21 Desember 2021.

Wireless Headphones

Nio Gadgets

SHOP NOW

Selain itu, ia mengungkapkan, jumlah tertanggung mencapai 9,3 juta tertanggung sampai dengan kuartal III-2021 atau tumbuh delapan persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Allianz berharap jumlah tertanggung tersebut bisa terus tumbuh di masa-masa yang akan datang.

Karin Zulkarnaen menjelaskan di kuartal III-2020 jumlah tertanggung tercatat sebanyak 8,3 juta tertanggung. Sedangkan di kuartal III di tahun ini tumbuh delapan persen atau bertambah satu juta tertanggung menjadi total ada 9,3 juta tertanggung.

"Sampai di November 2021 ini jumlah tertanggung sudah meningkat lagi. Sudah mencapai 10,4 juta tertanggung," kata Karin, di acara yang juga bersamaan dengan Allianz Journalist Writing Competition Winner Announcement.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Happy
 Inspire
 Confuse
 Sad

Judul	OJK: Pendapatan Premi Industri Asuransi Naik Single Digit
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Pertumbuhan Kinerja Asuransi
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20211222/215/1480318/ojk-pendapatan-premi-industri-asuransi-naik-single-digit
Tanggal Berita	2021-12-22
Sentimen	Netral

Home • Finansial • Asuransi

OJK: Pendapatan Premi Industri Asuransi Naik Single Digit

OJK mencatat pendapatan premi industri asuransi mencapai Rp10,58 triliun per Oktober 2021 atau hanya naik single digit secara year-on-year.


Denis Riantiza Melianova - Bisnis.com
22 Desember 2021 | 04:30 WIB



Ilustrasi memilih asuransi yang sesuai kebutuhan Anda - Freepik

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kenaikan pendapatan premi industri asuransi mengalami kenaikan senilai Rp10,58 triliun per Oktober 2021 atau tumbuh 4,92 persen year-on-year (yoy).

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 2A OJK Ahmad Nasrullah mengatakan, tren positif pertumbuhan positif tersebut menunjukkan bahwa industri asuransi merupakan salah satu industri yang cukup tangguh dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.

"Kita patut syukuri, meski pertumbuhan biasanya *double digit*, ini *single digit*, tapi masih tumbuh. Artinya, masih ada potensi ke depan di 2022 yang banyak pihak beranggapan masih jadi perlu perhatian kita dalam hal penanganan Covid-19," ujar Nasrullah dalam webinar Insurance Outlook 2022, Selasa (21/12/2021).

Baca Juga : OJK Segera Rilis Aturan Unit-link dan Insurtech, Ini Tanggapan Asosiasi

Di sisi lain, pertumbuhan premi tersebut juga menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berasuransi di masa pandemi. Menurut itu, minat masyarakat terhadap sektor asuransi cukup baik karena dinilai mampu memberikan proteksi di tengah berbagai ketidakpastian akibat pandemi.

Repot



OLX AUTOS



Jual

Meski parameter makro ekonomi dan sektor jasa keuangan menunjukkan tren bagus, Nasrullah mengingatkan agar para pelaku industri mencermati kondisi di 2022 yang masih memiliki risiko ketidakpastian, misalnya, munculnya varian baru Covid-19, Omicron.

"Varian Omicron yang secara penyebaran memiliki kemampuan lebih cepat menjadi ancaman bagi banyak negara, termasuk kondisi terburuk, yakni ditutupnya perbatasan pintu masuk. Kita tidak tahu seberapa besar dampaknya kepada kondisi masyarakat secara umum dan perekonomian, yang jelas beberapa negara Eropa sudah kembali mengeluarkan kebijakan lebih ketat, beberapa sudah memberlakukan lockdown dan segala macam," tuturnya.

Selain itu, kebijakan *tapering off* yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat juga perlu diantisipasi oleh para pelaku industri asuransi.

Judul	Perkuat Industri Asuransi, OJK Revisi Tiga Peraturan
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Revisi Peraturan OJK
Halaman/URL	23
Tanggal Berita	2021-12-22
Sentimen	Positif

Perkuat Industri Asuransi, OJK Revisi Tiga Peraturan

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merevisi tiga aturan untuk industri asuransi meliputi kebijakan *countercyclical*, penyelenggaraan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI), serta ketentuan mengenai *insurance technology* (*insurtech*). Ketiga aturan itu menjadi prioritas regulator untuk segera diterbitkan.

Oleh Prisma Ardianto

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2A OJK Ahmad Nasrullah menyampaikan, ketangguhan industri asuransi dan respons baik dari masyarakat dikala pandemi perlu diapresiasi. Premi asuransi komersial tumbuh 4,92% secara *year on year* (yoy) atau bertambah Rp 10,85 triliun.

Dia juga mengatakan, parameter ekonomi makro dan sektor jasa keuangan memperlihatkan tren positif. Tapi untuk tahun 2022 patut dicermati karena risiko ketidakpastian masih membayangi industri asuransi. Terlepas dari ancaman peningkatan kasus Covid-19 atas varian Omicron dan *tapering off*, tentu OJK perlu tetap menjaga stabilitas industri lewat pembaruan sejumlah kebijakan di masa mendatang.

"Ada banyak yang sedang direvisi mengenai regulasi tapi saya angkat tiga saja. Mengenai *countercyclical*, PAYDI, dan POJK 70/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, pialang asuransi, dan penilai kerugian," kata Ahmad Nasrullah pada acara *Insurance Outlook 2022* "Perekonomian 2022 Pulih, Industri Asuransi Tumbuh Tinggi" oleh Media Asuransi, Selasa (21/12).

Pertama, OJK sedang menyiapkan kebijakan *countercyclical* lanjutan bagi industri asuransi sebagai antisipasi atas kondisi ketidakpastian yang masih berlanjut. "Pada 2022, kami melihat pandemi ini masih perlu menjadi perhatian. Kami melihat perlu menjaga stabilitas industri dengan menerbitkan kebijakan *countercyclical*, yang sudah ada akan diperpanjang dan akan kami tambah berdasarkan masukan dari industri," ucap Nasrullah.

Kedua, kata dia, menyangkut regulasi PAYDI yang dinilai sudah usang. Ke-



Ahmad Nasrullah

tentuan produk itu sudah ada sejak 15 tahun sehingga perlu direvisi dan disempurnakan. Apalagi belakangan muncul ke publik permasalahan-permasalahan pada PAYDI, salah satunya merupakan *unit link*. "Kami sudah bicara dengan asosiasi, potensi perbaikannya akan seperti apa? Jadi ini memang sedang ditunggu industri. *Insyallah* ini sudah dalam tahap akhir penyelesaian, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami keluarkan aturannya," ungkap dia.

Ketiga, Nasrullah mengatakan, revisi juga dilakukan pada POJK 70/2016 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. Perbaikan itu dilakukan utamanya untuk mewadahi sekaligus mengantisipasi perkembangan dari *insurtech*.

"Ini sedang direvisi juga aturannya, ini untuk mengantisipasi *insurtech* yang sedang berkembang. Kami memang belum membuat aturan khusus untuk *insurtech* ini. Ini akan kami prioritaskan juga untuk bisa terbit segera, supaya setiap penyelenggara *insurtech*



Ada banyak yang sedang direvisi mengenai regulasi tapi saya angkat tiga saja. Mengenai *countercyclical*, PAYDI, dan POJK 70/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, pialang asuransi, dan penilai kerugian.

Ahmad Nasrullah

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2A OJK

ini jelas, dan supaya *level playing field* di pasar menjadi jelas," beber dia.

Respons Asosiasi

Pada kesempatan itu, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) HSM Widodo menyatakan, pembahasan mengenai aturan PAYDI sudah berlangsung hampir tiga tahun. Namun AAUI telah melakukan pertemuan terakhir dengan OJK dan dikatakan aturan PAYDI sudah masuk proses finalisasi. Dalam hal ini, pihaknya bersyukur jika masukan yang disampaikan bisa terealisasi dan bakal tetap menjalankan setiap ketentuan yang berlaku.

"Regulasi tentunya untuk industri yang sehat, *customer* yang *proper*, dan bisnis yang *sustainable*. Jadi sebenarnya dengan dasar itu kami akan ikuti, karena kami juga diajak sejak awal maka kami

bantu melakukan sosialisasi-sosialisasi pada anggota," kata Widodo.

Berbeda dengan asuransi umum, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan, pembahasan terkait ketentuan PAYDI bersama OJK hanya beberapa bulan. Saat ini sejumlah masukan atau usulan sudah mengerucut sehingga ketentuan baru PAYDI sudah masuk pada tahap harmonisasi.

Sedangkan terkait ketentuan *countercyclical* lanjutan, AAJI tentu menyambut baik kebijakan tersebut karena berdampak positif bagi perusahaan asuransi jiwa. "AAJI sepakat itu diberlakukan lagi, bahkan kalau perlu penjualan melalui *non face to face* itu dilanjutkan secara permanen. Mengenai PAYDI, memang sudah 15 tahun dan perlu pengkinian untuk menyesuaikan perubahan zaman," kata dia.

Togar meyakini, regulasi yang dikeluarkan OJK bisa membuat kepastian hukum bagi pelaku usaha, termasuk rencana untuk mewadahi industri *insurtech*. Hal itu juga nantinya akan mempertegas kedudukan masing-masing model bisnis *insurtech*.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) turut Erwin Noekman menuturkan bahwa kebijakan *countercyclical* menjadi bagian penting karena berbagai stimulus yang masih dibutuhkan industri. Begitu juga revisi mengenai aturan PAYDI yang dinilai membuka peluang untuk industri terus berinovasi.

"Karena PAYDI tidak melulu harus *unit link*, sehingga bukan tidak mungkin di asuransi syariah pun juga bisa investasi melalui emas. Hal itu juga diperkenankan di POJK 72/2016 mengenai asuransi syariah. Sehingga memberikan keyakinan bagi masyarakat atau calon nasabah. Karena nantinya investasi akan berbentuk fisik, masyarakat lebih merasa aman," kata Erwin.